

# **STRUKTUR KETENAGAKERJAAN DAN PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PEDESAAN INDONESIA**

**Nugraha Setiawan**



**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
2006**

## **KATA PENGANTAR**

Permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia sepertinya tidak pernah kunjung selesai. Dari mulai sulitnya mencari lapangan kerja yang banyak menimbulkan pengangguran, disparitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang menimbulkan ketidakseimbangan dan menyebabkan terjadinya arus migrasi tenaga kerja lebih banyak ke wilayah perkotaan, maupun masalah lain seperti perundang-undangan dan peraturan di bidang ketenagakerjaan.

Tulisan ini akan mencoba menyoroti masalah struktur tenaga kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di pedesaan Indonesia, berdasarkan data hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2004. Fokus pengkajian hanya melibatkan dua variabel utama yaitu struktur umur dan tingkat pendidikan.

Karakteristik struktur umur perlu sekali dipahami, sebab berkaitan erat dengan produktivitas. Misalnya semakin tinggi proporsi pekerja berusia muda maka mereka sangat potensial untuk berproduksi, namun pada konteks penganggur akan lebih berkaitan dengan kurangnya pengalaman kerja. Akan tetapi kalau terlalu muda pun, dapat disebut kurang berkualitas, karena berkaitan dengan masuknya pekerja berpendidikan rendah ke dunia kerja.

Berkaitan dengan pendidikan, dibahas pula karakteristik struktur tenaga kerja dan angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Harapannya tentu saja, angkatan kerja di pedesaan, baik yang telah mendapatkan pekerjaan maupun yang masih sedang mencari pekerjaan, punya pendidikan yang cukup baik. Semuanya itu akan terlihat dari hasil analisis yang akan dilakukan.

Mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji masalah ketenagakerjaan. Juga bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ketenagakerjaan di pedesaan.

Jatinangor, Juli 2006

Penulis,  
Nugraha Setiawan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
I PENDAHULUAN .....	1
II STRUKTUR TENAGA KERJA .....	4
2.1. Struktur Umur Tenaga Kerja .....	4
2.2. Struktur Pendidikan Tenaga Kerja .....	6
III STRUKTUR ANGKATAN KERJA .....	10
3.1. Struktur Umur Angkatan Kerja .....	10
3.2. Struktur Pendidikan Angkatan Kerja .....	12
IV TINGKAT PARTISPASI ANGKATAN KERJA ....	15
4.1. TPAK Menurut Umur .....	15
4.2. TPAK Menurut Tingkat Pendidikan .....	17
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	21
5.1. Kesimpulan .....	21
5.2. Rekomendasi .....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	23

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persentase Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, 2004 .....	5
Tabel 2.2. Persentase Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, 2004.....	7
Tabel 3.1. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, 2004 .....	11
Tabel 3.2. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, 2004.....	13

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia,2003 .....	16
Grafik 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia,2003.....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Di pedesaan Indonesia kesempatan kerja semakin sulit, bahkan di pedesaan pulau Jawa, sulitnya kesempatan kerja tersebut telah dirasakan sejak awal tahun tujuh puluhan akibat terjadinya fragmentasi lahan pertanian. Semakin sempitnya lahan pertanian, menurut Manning (1987) telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur pekerjaan di pedesaan yang mengarah ke sektor non pertanian.

Walaupun terjadi perubahan struktur pekerjaan di wilayah pedesaan, Hayami (1988) melihat, ternyata kontribusi pekerjaan di pedesaan terhadap total peluang kerja khususnya di sektor perdagangan dan industri ternyata terus berkurang. Kondisi ini menyebabkan banyak penduduk pedesaan yang mencari kerja di luar desanya terutama di perkotaan, sehingga menimbulkan masalah baru, yaitu derasnya arus mobilitas penduduk dari wilayah desa ke perkotaan.

Pada saat ini, kondisi ketenagakerjaan di pedesaan mungkin sudah banyak berubah dari gambaran di atas. Hasil Sakernas 2004 menunjukkan adanya perubahan-perubahan tersebut. Misalnya, dilihat dari struktur pendidikan, angkatan kerja pedesaan telah mengalami perbaikan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah perkotaan, terlihat masih adanya beberapa hal yang perlu

dibenahi, baik itu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya maupun memperluas kesempatan kerja. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang diperlukan antara lain, menumbuhkan kesempatan kerja baru yang sesuai dengan kondidi angkatan kerja serta menangani semakin derasnya arus pencari kerja pedesaan ke perkotaan.

Tulisan ini mencoba mengkaji kondisi ketenagakerjaan di pedesaan, yang dirinci dari aspek tenaga kerja, angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, berdasarkan data hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2004. Analisis dilakukan dengan cara mengkomparasikan kondisi ketenagakerjaan di pedesaan dan perkotaan berdasarkan struktur umur serta tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Sejak tahun 2000 Sakernas menerapkan konsep-konsep ketenagakerjaan sebagai berikut: Lapangan pekerjaan atau sektor pekerjaan didasarkan pada KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2000, yang merupakan revisi dari KLUI tahun 1997. Jenis pekerjaan, sejak Sakernas 2001, kembali menggunakan ISCO (*International Standard Classification of Occupation*) tahun 1968 atau KJI (Klasifikasi Jenis Pekerjaan Indonesia) tahun 1982.

Perlu diketahui pula, bahwa publikasi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik mengenai ketenagakerjaan, ada dua macam batasan umur. Pertama memakai ukuran batas usia kerja 10 tahun ke atas, dan yang kedua 15 tahun ke atas. Data



yang dikaji pada tulisan ini menggunakan batasan usia kerja 15 tahun ke atas, jikapun ada pembandingan yang memakai batas usia kerja 10 tahun ke atas, akan distandarkan terlebih dahulu pada usia 15 tahun ke atas.

Digunakannya batas usia kerja 15 tahun ke atas, akan memudahkan bagi perencana ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah, sebab pembuat kebijakan ketenagakerjaan biasanya mendasarkan pada batasan usia kerja 15 tahun ke atas (Setiawan, 2000). Dengan demikian, jika para perencana ketenagakerjaan memakai data BPS, tidak direpotkan lagi dengan penyesuaian data dasar.

## **BAB II**

### **STRUKTUR TENAGA KERJA**

#### **2.1. Struktur Umur Tenaga Kerja**

Sebelum membahas mengenai struktur angkatan kerja, ada baiknya membahas terlebih dahulu struktur tenaga kerja (*labour*) atau sering pula disebut dengan istilah penduduk usia kerja. Konsep tenaga kerja yang dipakai pada tulisan ini adalah seluruh penduduk yang telah berumur 15 tahun ke atas, tanpa menggunakan batas atas usia kerja.

Data yang tercantum pada Tabel 2.1 memperlihatkan, proporsi tenaga kerja yang berada di pedesaan, lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di perkotaan. Hal ini mudah dimengerti, sebab jumlah penduduk pedesaan masih jauh lebih banyak dari pada penduduk perkotaan.

Kecenderungan perkembangan beberapa variabel demografi mendukung argumentasi di atas. Sampai saat ini fertilitas penduduk di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Walaupun tingkat mortalitas pedesaan juga lebih tinggi, juga adanya kecenderungan penduduk pedesaan yang melakukan migrasi ke perkotaan lebih banyak dari pada yang berasal dari kota masuk ke pedesaan (Saefullah, 2002), namun belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk pedesaan.

**Tabel 2.1. Persentase Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia 2004**

Kel. Umur	Tenaga Kerja	
	Pedesaan	Perkotaan
15-19	13,5	14,4
20-24	11,2	14,2
25-29	12,6	13,5
30-34	11,6	12,0
35-39	11,8	11,2
40-44	9,7	9,2
45-49	8,0	7,3
50-54	6,2	5,4
55-59	4,8	3,8
60+	10,6	9,0
<b>Jumlah</b> (% baris)	<b>100,0</b> (55,3)	<b>100,0</b> (44,7)

*Sumber: BPS (2005), hasil Sakernas 2004, diolah ulang penulis.*

Jika mencermati lebih jauh Tabel 2.1 tersebut, nampak bahwa tenaga kerja berusia 15-34 tahun di daerah pedesaan proporsinya lebih sedikit dibandingkan dengan di perkotaan. Kondisi sebaliknya terlihat pada usia tenaga kerja 35 tahun ke atas, tenaga kerja pedesaan pada kelompok umur ini ternyata persentasenya lebih banyak dari di perkotaan.

Fenomena di atas dapat diterangkan sebagai berikut. Pada waktu masih muda penduduk pedesaan cenderung lebih banyak yang bermigrasi ke luar wilayahnya. Penduduk usia muda yang masih dalam masa sekolah memilih melanjutkan sekolah di daerah lain terutama di kota untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Mereka yang terjun ke dunia

kerja, lebih senang mengadu nasib untuk mencari pekerjaan dan bekerja di kota, dengan harapan akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun ada kecenderungan pula, semakin bertambah usia mereka, sesudah tidak bisa terlalu produktif bekerja di kota, mereka kembali ke desanya masing-masing (Setiawan, 1998).

Makna umum yang tercermin dari data yang terdapat pada Tabel 2.1 adalah, bahwa potensi produktivitas sumber daya manusia di pedesaan jika dilihat dari aspek produktivitas ternyata tidak lebih bagus dibandingkan dengan di perkotaan. Proporsi tenaga kerja yang berusia lebih tua di pedesaan mengindikasikan hal di atas. Akan tetapi, perlu dikaji lebih jauh, bagaimana struktur angkatan kerjanya, sebab tidak semua tenaga kerja memasuki dunia kerja. Berkaitan dengan struktur angkatan kerja akan dibahas pada bab selanjutnya.

## **2.2. Struktur Pendidikan Tenaga Kerja**

Selain umur, variabel yang juga penting untuk dikaji dalam ketenagakerjaan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja. Idealnya, tenaga kerja yang tersedia di suatu negara memiliki pendidikan yang memadai sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia, namun di negara-negara yang dalam kondisi masih sedang berkembang biasanya sering terjadi *mismatch* antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuninya.

Pendidikan tenaga kerja, sering diukur dengan proporsi tenaga kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Data yang tersaji dalam Tabel 2.2. merupakan struktur tingkat pendidikan tenaga kerja yang dibedakan berdasarkan daerah pedesaan dan perkotaan.

**Tabel 2.2. Persentase Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia 2004**

Tk. Pend	Tenaga Kerja	
	Pedesaan	Perkotaan
Tdk Sekolah	10,8	4,6
TT SD	19,3	9,6
SD	42,5	25,5
SLTP	17,3	23,5
SLTA Umum	5,5	19,5
SLTA Kej.	3,2	10,3
Dip/Akd	0,8	3,1
Univ	0,6	3,9
<b>Jumlah</b> (% baris)	<b>100,0</b> (55,3)	<b>100,0</b> (44,7)

*Sumber: BPS (2005), hasil Sakernas 2004, diolah ulang penulis.*

Dari Tabel 2.2 nampak, tenaga kerja pedesaan lebih banyak didominasi oleh mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak sekolah, yang tidak tamat SD, dan mereka yang hanya mengantongi ijazah SD. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan SLTP ke atas proporsinya lebih banyak berdomisili di perkotaan. Hal ini, barangkali banyak berkaitan dengan lebih banyaknya fasilitas pendidikan formal di kota dibandingkan dengan di pedesaan.

Selain itu, bisa juga karena masyarakat pedesaan belum begitu mamahami arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Faktor lain, dan ini mungkin faktor yang paling menentukan, karena biaya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi relatif mahal, sementara sebagian besar masyarakat di pedesaan masih banyak yang tergolong miskin (BPS, 2003).

Di pedesaan proporsi tenaga kerja berpendidikan SD adalah yang terbanyak, demikian juga di perkotaan, walaupun persentase lebih kecil jika dibandingkan dengan di wilayah pedesaan. Sementara itu, tenaga kerja di pedesaan dengan kualifikasi pendidikan SLTP, juga sudah lumayan banyak, bahkan proporsinya tidak terpaut terlalu jauh dari tenaga kerja berpendidikan SLTP perkotaan.

Mungkin ini merupakan hasil yang sudah mulai bisa dipetik dengan banyaknya pembukaan SLTP di wilayah pedesaan, sehingga para lulusan SD yang ingin melanjutkan ke SLTP tidak perlu lagi pergi ke kota. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan menjadi tidak terlampau mahal, dan secara ekonomi menjadi terjangkau oleh orang tua di pedesaan yang menginginkan anaknya meraih pendidikan yang lebih baik.

Walaupun struktur pendidikan tenaga kerja pedesaan ini nampak sudah mulai membaik, namun jika melihat mereka yang berkualifikasi pendidikan SLTA, baik itu umum maupun kejuruan, tingkat diploma atau dahulu sama dengan tingkat

akademi, serta mereka yang telah meraih pendidikan sarjana, angkanya masih terlihat jomplang dibandingkan terhadap tenaga kerja yang ada di perkotaan. Misalnya tenaga kerja pedesaan yang berpendidikan SLTA umum proporsinya hanya sekitar sepertiga dari tenaga kerja berpendidikan sama di perkotaan. Apalagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan sarjana, proporsi tenaga kerja pedesaan hanya sekitar 15 persen dibandingkan dengan mereka yang ada di perkotaan.

Selain itu, jika menghitung persentase tenaga kerja pedesaan yang berpendidikan SD ke bawah, maka jumlahnya masih sangat tinggi yaitu 76,6 persen, sedangkan di perkotaan tinggal 39,7 persen. Semuanya itu megisyaratkan, walaupun telah ada perbaikan struktur pendidikan tenaga kerja pedesaan, akan tetapi masih perlu upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikannya. Mengingat umumnya masyarakat pedesaan masih terjerat kemiskinan, maka kebijakan pendidikan gratis, atau paling tidak kebijakan pendidikan yang murah tapi berkualitas, serta dapat terjangkau oleh hampir semua lapisan masyarakat di pedesaan sangat perlu untuk segera diupayakan.

## **BAB III**

### **STRUKTUR ANGKATAN KERJA**

#### **3.1. Struktur Umur Angkatan Kerja**

Pada tulisan ini, definisi angkatan kerja yang digunakan mengacu pada *Labour Force Concept* yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization*. Telah dibahas pada bab 2, mengenai tenaga kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Tenaga kerja tersebut bisa dikelompokkan lagi menjadi: (1) bukan angkatan kerja, dan (2) angkatan kerja.

Termasuk bukan angkatan kerja antara lain tenaga kerja yang sebagian besar waktunya digunakan untuk mengurus rumah tangga, sekolah, serta para pensiunan dan orang yang cacat fisik sehingga tidak dapat melakukan suatu pekerjaan. Sementara yang termasuk angkatan kerja adalah tenaga kerja yang sedang bekerja atau sedang berusaha mencari pekerjaan.

Tabel 3.1 memberikan gambaran mengenai struktur umur angkatan kerja Indonesia di daerah pedesaan maupun perkotaan. Secara umum, proporsi angkatan kerja pedesaan lebih banyak dari pada angkatan kerja perkotaan. Keadaan seperti ini sejalan dengan struktur tenaga kerja, hanya saja rasio angkatan kerja pedesaan terhadap perkotaan angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan rasio tenaga kerja pedesaan. Fenomena ini mengindikasikan, bahwa secara umum tenaga kerja yang tinggal di pedesaan lebih banyak yang memasuki



aktivitas ekonomi (angkatan kerja) dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

**Tabel 3.1. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, 2004**

Kel. Umur	Angkatan Kerja	
	Pedesaan	Perkotaan
15-19	8,8	7,5
20-24	10,7	14,7
25-29	12,9	15,2
30-34	12,5	13,9
35-39	13,5	13,0
40-44	11,3	11,0
45-49	9,2	8,9
50-54	7,1	6,4
55-59	5,3	3,7
60+	8,7	5,8
<b>Jumlah</b> (% baris)	<b>100,0</b> (59,0)	<b>100,0</b> (41,0)

*Sumber: BPS (2005), hasil Sakernas 2004, diolah ulang penulis.*

Dilihat dari struktur umur, angkatan kerja pedesaan usia muda hingga 34 tahun, ternyata proporsinya lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan, kecuali pada kelompok umur 15-19 tahun. Hal ini memperkuat dugaan, bahwa tenaga kerja yang tergolong angkatan kerja banyak yang mencoba mengadu nasib untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Sementara itu, angkatan kerja 15-19 tahun yang proporsinya lebih banyak di pedesaan, kemungkinan agak enggan pergi ke kota sehubungan pendidikan mereka yang kurang memadai,

dan sudah memperhitungkan tidak akan kuat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di kota.

Selanjutnya Tabel 3.1 juga memperlihatkan, proporsi angkatan kerja yang berusia 35 tahun ke atas lebih banyak yang tinggal di pedesaan dari pada di perkotaan. Pada usia tersebut mungkin mereka yang berstatus sebagai migran pekerja di kota sudah merasa tidak bisa produktif lagi, sehingga lebih memilih pulang ke desa. Bisa pula mereka merasa telah cukup mencari bekal hidup dengan bekerja banting tulang di kota, dan setelah tua tinggal menikmati remitan di desa yang mereka tabungkan sebelumnya, agar dapat dinikmati pada masa tuanya.

### **3.2. Struktur Pendidikan Angkatan Kerja**

Data yang tersaji dalam Tabel 3.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di pedesaan nampak lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Di pedesaan ada kecenderungan mengelompok pada tingkat pendidikan tidak tamat SD, berijazah SD, serta SLTP. Sementara itu di daerah perkotaan terdiri atas angkatan kerja berpendidikan tamat SD, SLTP, dan SLTA.

Kalau diamati secara parsial, struktur pendidikan di pedesaan, paling banyak berada pada jenjang pendidikan SD, demikian pula halnya di daerah perkotaan. Hanya saja, jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SD di daerah pedesaan

lebih dari empat puluh persen, sedangkan di perkotaan hanya sekitar seperempat dari total angkatan kerja.

**Tabel 3.2. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, 2004**

Tk. Pend	Angkatan Kerja	
	Pedesaan	Perkotaan
Tdk Sekolah	9,7	3,4
TT SD	20,1	9,5
SD	43,4	25,7
SLTP	15,5	19,3
SLTA Umum	5,8	19,9
SLTA Kej.	3,7	12,6
Dip/Akd	1,1	4,0
Univ	0,7	5,6
<b>Jumlah</b> (% baris)	<b>100,0</b> (59,0)	<b>100,0</b> (41,0)

Sumber: BPS (2005), hasil Sakernas 2004, diolah ulang penulis.

Di pedesaan, yang perlu juga memperoleh perhatian adalah angkatan kerja yang pernah bersekolah akan tetapi tidak sampai tamat SD, dengan jumlah mencapai seperlima bagian dari seluruh angkatan kerja. Padahal kalau dibandingkan dengan di perkotaan, jumlah yang tidak tamat SD ini hanya kurang dari 10 persen. Keadaan ini akan menjadi persoalan, manakala sektor pekerjaan pertanian di pedesaan makin berkurang, sementara sektor pekerjaan pertanian lainnya belum bisa berkembang (Manning, 1987; Hayami, 1988).

Masalah ketenagakerjaan tidak melulu ada di pedesaan, diperkotaan pun masalah itu masih tetap menjadi hal yang

sangat perlu diantisipasi. Struktur pendidikan angkatan kerja perkotaan, memang menunjukkan tanda yang lebih baik dibandingkan dengan pedesaan, namun rupanya tidak dibarengi dengan berkembangnya kesempatan kerja yang memadai dan sesuai dengan pendidikannya. Fenomena *mismatch* antara lapangan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan, merupakan hal yang lumrah ditemukan di perkotaan.

## **BAB IV**

### **TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**

#### **4.1. TPAK Menurut Umur**

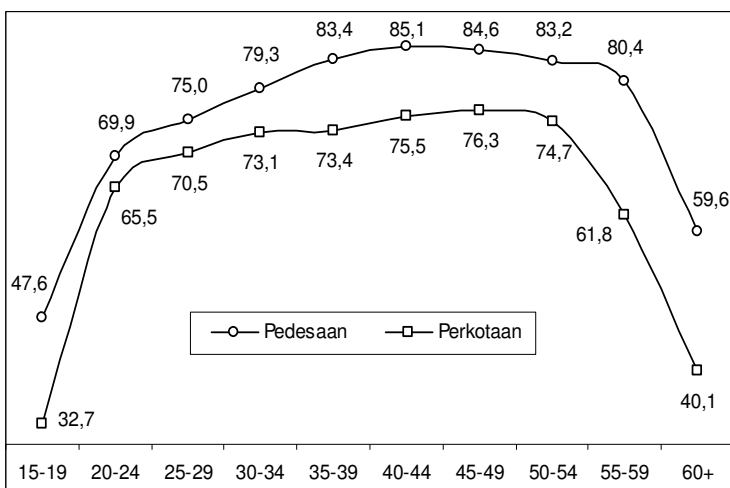
TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah salah satu ukuran ketenagakerjaan yang banyak digunakan. Pengukuran TPAK dilakukan dengan cara menghitung jumlah absolut seluruh angkatan kerja dibagi dengan seluruh tenaga kerja atau penduduk usia kerja kemudian dikalikan 100. Jika TPAK 75 persen, artinya terdapat 75 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan, setiap 100 orang tenaga kerja. Berdasarkan TPAK kita dapat melakukan perkiraan, berapa besar penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Gambaran dalam Grafik 4.1 memperlihatkan, ternyata TPAK di pedesaan jauh lebih tinggi dalam semua tingkatan umur. Keadaan seperti itu, paling tidak telah terjadi sejak lebih dari tigapuluh tahun yang lalu (Secha dan Trisilo, 1990). Hal ini merupakan bukti, tentang lebih banyaknya penduduk usia kerja di pedesaan yang memasuki dunia kerja dibandingkan dengan yang bersekolah, atau yang hanya mengurus rumah tangga serta kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bukan kerja dan mencari pekerjaan.

Lebih tingginya TPAK pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, paling tidak dapat ditafsirkan dari dua sisi. Pertama,

dilihat dari etos kerja, mungkin masyarakat desa lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perkotaan, sehingga mereka kebanyakan bergiat dalam aktivitas ekonomi. Kedua, bisa pula mereka masuk ke dunia kerja karena terpaksa, akibat adanya himpitan kehidupan yang begitu kuat, sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja agar dapat bertahan hidup.

**Grafik 4.1. TPAK Menurut Kelompok Umur di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, 2004**



Sumber: BPS (2005), hasil Sakernas 2004, diolah ulang penulis.

Alasan yang terakhir sepertinya lebih masuk akal, sebab kalau dilihat berdasarkan struktur umur, ternyata TPAK di pedesaan lebih tinggi pada semua kelompok umur. Hal ini berarti, ada “pengerahan” tenaga kerja mulai dari pekerja yang masih muda, sudah dewasa, sampai yang telah tua, untuk selalu melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan cara melakukan

pekerjaan dan mencari pekerjaan apa saja, yang penting dapat menghidupi dirinya serta keluarganya..

Tersirat pula adanya kecenderungan yang berbeda antara di pedesaan dan di perkotaan. Di Pedesaan walaupun umur sudah beranjak tua, mereka harus tetap bekerja. Hal ini terlihat dengan makin merenggangnya garis TPAK antara di pedesaan dan perkotaan, yang mulai terjadi pada kelompok umur 35-39 tahun ke atas (Grafik 1). Mungkin hal ini berkaitan dengan tanggungjawab dari mereka yang sudah memiliki keluarga dan punya anak, sehingga pada umur ini harus bekerja ekstra guna membiayai sekolah anak-anaknya.

#### **4.2. TPAK Menurut Tingkat Pendidikan**

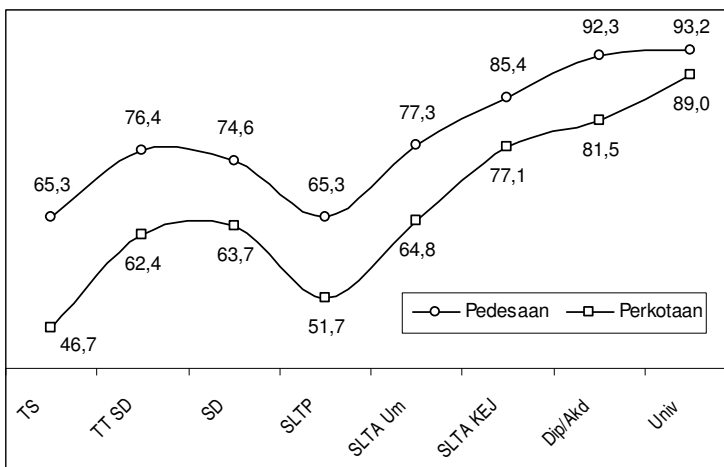
Seperti halnya TPAK yang didasarkan pada kelompok umur, pola TPAK yang didasarkan pada pengelompokan tingkat pendidikan pun, seperti nampak pada Grafik 4.2, juga merupakan gambaran umum di Indonesia, dan telah terjadi sejak beberapa tahun ke belakang (Setiawan, 2002). Ternyata pada semua jenjang pendidikan, TPAK di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan.

Informasi baik yang diperoleh dari Grafik 4.2 adalah rendahnya TPAK dari kelompok yang tidak sekolah, jika dibandingkan dengan kelompok tingkat pendidikan lainnya. Kondisi seperti itu, selain terjadi di pedesaan, terjadi pula di daerah perkotaan. Rendahnya TPAK di sini, jika kembali

melihat pembahasan terdahulu, sebagai akibat sedikitnya angkatan kerja yang tidak sekolah, yang diperkirakan berasal dari angkatan kerja generasi tua.

Pada segmen pendidikan SLTP ada kecenderungan yang sama antara pedesaan dan perkotaan, yaitu memiliki TPAK yang rendah, bahkan yang terendah diantara kelompok yang pernah menamatkan pendidikan formalnya. Sementara pada pendidikan yang lebih rendah, yaitu tidak tamat SD, dan tamat SD, TPAK-nya malah lebih tinggi.

**Grafik 4.2. TPAK Menurut Tingkat Pendidikan di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, 2004**



Sumber: BPS (2005), hasil Sakernas 2004, diolah ulang penulis.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah lebih tingginya TPAK pada pendidikan SD disebabkan masih banyaknya yang *drop out* dari SD, serta sebab lebih banyaknya lulusan SD yang



tidak melanjutkan ke SLTP, atau karena sudah lebih banyak lulusan SLTP yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak tenaga kerja SLTP yang tidak bisa lagi digolongkan sebagai angkatan kerja. Harapannya tentu saja jatuh pada kemungkinan yang kedua, atau lebih banyak lulusan SLTP yang melanjutkan ke SLTA, bukannya disebabkan lebih banyaknya anak SD yang tidak menamatkan pendidikannya, atau lulus SD tetapi tidak melanjutkan sekolah.

Kalau kita mengamati dan mengkaji kembali Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dan mencoba memperbandingkannya, akan diperoleh gambaran yang lebih jelas. Dari kedua tabel tersebut ternyata diperoleh informasi, bahwa proporsi tenaga kerja pada kelompok SLTP lebih tinggi jika dibandingkan dengan proporsi angkatan kerja, terutama di pedesaan. Sementara itu, keadaan yang sebaliknya terjadi pada kelompok pendidikan yang belum atau tidak tamat SD serta tamat SD. Artinya, harapan di atas itu didukung oleh data, dan kenyataannya banyak tenaga kerja yang telah lulus dari SLTP melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih atas, sehingga mereka tidak tercatat sebagai angkatan kerja lulusan SLTP.

Walaupun fenomena ini merupakan preseden baik, tetapi kelihatannya tenaga kerja di Indonesia sebagian besar hanya mampu sekolah sampai tingkat SLTA, dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Buktinya, terjadi peningkatan TPAK yang tajam dari mulai pendidikan SMTA terutama di pedesaan.

Sementara tingginya TPAK pada jenjang pendidikan tinggi, bukan berarti lebih banyak angkatan kerja yang berpendidikan perguruan tinggi. Angkanya menjadi besar, sebab jumlah tenaga kerja pada tingkat pendidikan tersebut memang hanya sedikit, dan hampir semuanya melakukan aktivitas ekonomi sehingga tercatat sebagai angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan (lihat kembali Tabel 2.1 dan Tabel 3,1).

Satu hal lagi yang perlu dicermati, yaitu lebih tingginya TPAK pedesaan dari pada perkotaan, walaupun telah dikontrol oleh struktur umur dan tingkat pendidikan. Mudah-mudahan tingginya TPAK di pedesaan disebabkan oleh lebih banyaknya angkatan kerja yang telah bekerja, bukannya angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan. Namun untuk mengetahui hal tersebut perlu dikaji mengenai tingkat pengangguran.

Hasil penelusuran Setiawan (2005), terhadap struktur penganggur dan tingkat pengangguran memperlihatkan, bahwa tingkat pengangguran di pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal tersebut berarti, secara relatif angkatan kerja di desa lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja yang ada di perkotaan. Jadi TPAK di desa tinggi, karena banyak disumbang oleh mereka yang telah kerja dibandingkan yang masih mencari pekerjaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pengkajian dan hasil analisis terhadap kondisi ketenagakerjaan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di pedesaan Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Tenaga kerja yang bermukim di pedesaan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan di perkotaan. Pada umumnya mereka berumur muda, yaitu antara 15-39 tahun, baik di daerah pedesaan maupun diperkotaan. Namun jika dilihat dari pendidikannya, tenaga kerja di pedesaan memiliki tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan.
2. Selain tenaga kerja, angkatan kerja pedesaan pun jumlahnya lebih banyak dibandingkan perkotaan. Struktur umur dari angkatan kerja sedikit lebih tua (20-44 tahun) dibandingkan dengan tenaga kerja, kondisi tersebut hampir sama antara pedesaan dan perkotaan. Struktur pendidikan angkatan kerja pedesaan mengelompok pada tingkatan SLTP ke bawah, sementara di kota berpendidikan antara SD dan SLTA.
3. Walaupun dari segi pendidikan angkatan kerja pedesaan kualitasnya di bawah perkotaan, namun kalau di lihat dari aspek partisipasi angkatan kerja, ternyata memiliki TPAK yang lebih tinggi dari perkotaan. Lebih tingginya TPAK

pedesaan, terjadi pada semua kelompok umur dan seluruh tingkat pendidikan.

## **5.2. Rekomendasi**

Mengingat butir-butir kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah, pembangunan ketenagakerjaan sebaiknya lebih diarahkan ke pedesaan, sebab di sinilah banyak bermukimnya tenaga kerja dan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Sementara itu, angkatan kerja di pedesaan pun memiliki partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, tetapi karena tingkat pendidikannya yang rendah kemungkinan lebih banyak berada pada sektor-sektor pekerjaan yang tergolong sebagai *blue collar*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Secha dan Rudi Bambang Trisilo. 1990. "Struktur Ketenagakerjaan di Indonesia" dalam Aris Ananta (ed.), *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LDFE-UI.
- Badan Pusat Statistik. 2003. *Data dan Informasi kemiskinan Tahun 2003*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2004*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hayami, Yujiro. 1988. "Asian Development: A View from the Paddy Fields", *Asian Development Review*, 6(1): 50-63.
- Manning, Chris. 1987. "Penyerapan Tenaga Kerja di Pedesaan Jawa: Pelajaran Revolusi Hijau dan Bonanza Minyak, dan Prospeknya di Masa Depan", *Seminar Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta, 1-3 Oktober 1987.
- Saefullah, A. Djadja. 2002. "Socio-Cultural Impacts of Out Movement on Village of Origin", *Jurnal Kependudukan*, 4(2): 105-120.
- Setiawan, Nugraha. 1998. *Profil Kependudukan Propinsi Jawa Barat 1997*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan.
- Setiawan, Nugraha. 2000. "Desentralisasi Perencanaan Tenaga Kerja: Masalah Pemahaman Konsep, Data dasar, dan Pembuatan Asumsi", *Jurnal Kependudukan*, 2(2): 18-31.
- Setiawan, Nugraha. 2005. *Struktur Umur serta Tingkat Pendidikan Penganggur Baru dan Tingkat Pengangguran di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian Kependudukan dan SDM Unpad.